

Analisis Peran Republik Indonesia sebagai Negara Non-Blok dalam Perang antara Rusia, Ukraina, dan NATO

Imagrace Triamorita Tampubolon¹, Margaretha Shintauli², Audry Permatasari³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611260@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The ongoing conflict between Russia, Ukraine, and NATO has affected the international political and security order. Amidst these tensions, the Republic of Indonesia, as a non-aligned country, plays an important role in maintaining the principles of global peace and stability. As part of the Non-Aligned Movement (NAM), Indonesia consistently emphasizes the importance of dialogue, diplomacy, and peaceful resolution of any international conflict. In the context of the Russia-Ukraine war, Indonesia has put forward a neutral but active foreign policy, seeking to prevent further escalation by inviting all parties to engage in diplomatic efforts. This article examines how Indonesia, as a country that is not tied to any bloc, plays its role in easing global tensions. The main focus of this research is the analysis of Indonesia's foreign policy, the diplomatic stance taken, and the impacts it has on international relations and world stability. By maintaining its independence and neutrality, Indonesia seeks to maintain its strategic position in maintaining world peace and encouraging conflict resolution through constructive and peaceful channels.*

Abstrak: Konflik yang berlangsung antara Rusia, Ukraina, dan NATO telah mempengaruhi tatanan politik dan keamanan internasional. Di tengah ketegangan tersebut, Republik Indonesia, sebagai negara non-blok, memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas global. Sebagai bagian dari Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai atas setiap konflik internasional. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, Indonesia mengedepankan kebijakan luar negeri yang netral namun aktif, berusaha untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dengan mengajak semua pihak terlibat dalam upaya diplomatik. Artikel ini mengkaji bagaimana Indonesia, sebagai negara yang tidak terikat pada blok manapun, menjalankan perannya dalam meredakan ketegangan global. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, sikap diplomatik yang diambil, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan internasional dan stabilitas dunia. Dengan mempertahankan independensi dan netralitasnya, Indonesia berupaya menjaga posisi strategisnya dalam menjaga perdamaian dunia dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur yang konstruktif dan damai.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Indonesia, Non-Aligned Movement, Russo-Ukrainian War, World Peace.

Kata kunci :

Indonesia, Non Blok, Perang Rusia-Ukraina, Perdamaian Dunia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15512873>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu permasalahan utama dalam hubungan internasional sejak meletusnya ketegangan di tahun 2014, yang puncaknya terjadi pada tahun 2022. Kejadian ini memicu perhatian dunia yang luas, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap stabilitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan internasional. Ketegangan antara kedua negara dimulai dengan keputusan kontroversial Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich, yang pada akhir 2013 memilih untuk menunda penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan malah mempererat hubungan dengan Rusia. Keputusan ini menimbulkan protes besar yang dikenal dengan nama Euromaidan, yang akhirnya berujung pada penggulingan Yanukovich pada Februari 2014. Setelah itu, Rusia merespon dengan mengambil alih Semenanjung Krimea dan mendukung pemberontakan separatis di wilayah timur Ukraina, yang semakin memperburuk hubungan dengan negara-negara Barat.

Konflik yang berkembang tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan Rusia dan Ukraina, tetapi juga melibatkan NATO dan negara-negara besar lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan

Eropa Timur. Rusia memandang Ukraina sebagai bagian dari sphere of influence-nya, sementara NATO berusaha menjaga stabilitas dan keamanan negara-negara anggota yang berbatasan dengan Rusia, serta mencegah ekspansi kekuatan Rusia lebih jauh ke wilayah Eropa. Dampak dari perang ini juga dirasakan dalam aspek ekonomi, terutama terkait dengan pasokan energi dan pangan, yang mengguncang perekonomian Eropa dan dunia.

Di tengah ketegangan internasional ini, Indonesia sebagai negara non-blok berperan penting dalam menjaga posisi netral dan mencari solusi damai untuk mengurangi eskalasi konflik. Indonesia, dengan prinsip luar negeri bebas aktif, berusaha menjadi mediator yang tidak memihak, yang menekankan pentingnya diplomasi dan dialog dalam penyelesaian konflik internasional. Sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia, Indonesia memainkan peran strategis dalam forum-forum internasional, seperti G20, dalam menyuarakan pentingnya perdamaian dan stabilitas global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia sebagai negara non-blok dalam konflik antara Rusia, Ukraina, dan NATO. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Indonesia, dengan prinsip-prinsip luar negeri yang dijalkannya, dapat berkontribusi pada upaya penyelesaian damai dan menjaga keseimbangan geopolitik dunia, tanpa terikat pada salah satu blok kekuatan internasional. Dengan pendekatan yang menekankan pada diplomasi multilateral dan bantuan kemanusiaan, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di tengah konflik global yang berlangsung.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi konflik perang antara Rusia, Ukraina, dan NATO?
2. Bagaimana Peran Indonesia sebagai negara Non Blok dalam perang antara Rusia, Ukraina , dan NATO?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan penelitian kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.¹ Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur atau referensi yang menjelaskan bahan hukum sekunder². Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mencari peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum positif lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder melalui proses membaca, menganalisis, dan mengutip bahan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, data tersebut dianalisis untuk dideskripsikan, diinterpretasikan, dievaluasi, dan sistematisasi. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif. Untuk interpretasi, digunakan metode-metode interpretasi hukum yang sesuai dengan teori atau norma hukum yang relevan, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Konflik Antara Rusia, Ukraina, dan NATO

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sudah terjadi cukup lama, yang mulai memanaskan semenjak tahun 2014 dan mencapai puncak pada tahun 2022. Konflik antara 2 negara ini menjadi topik yang sangat diperhatikan dalam abad ini. Pada November 2013, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych membuat keputusan yang memicu gelombang protes besar di negaranya.

Yanukovych memilih untuk menunda penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan malah mempererat hubungan dengan Rusia. Keputusan ini sangat mengecewakan banyak orang

¹ Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hal. 98.

² Ali, Menggali Teori Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hal. 47.

³ *Op. Cit.*, hal. 111.

Ukraina yang menginginkan hubungan lebih dekat dengan negara-negara Barat. Protes besar, yang dikenal dengan nama Euromaidan, terjadi di seluruh Ukraina, lalu pada Februari 2014, setelah berbulan-bulan protes yang semakin besar dan kekerasan yang terjadi, Viktor Yanukovych akhirnya digulingkan dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan baru yang terbentuk lebih condong ke Barat, yang semakin memperburuk hubungan dengan Rusia.

Dalam menanggapi perubahan ini pada Maret 2014, Rusia mengambil langkah drastis dengan menguasai Semenanjung Krimea yang merupakan bagian dari Ukraina. Langkah ini mendapat kecaman internasional karena dianggap ilegal dan melanggar hukum internasional. Atas alasan tersebut, pemberontakan separatis meletus di wilayah timur Ukraina, tepatnya di Donetsk dan Luhansk, yang berusaha memisahkan diri dari Ukraina dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pemberontakan ini mendapat dukungan dari Rusia, yang dituduh mengirim pasukan dan senjata untuk memperkuat kelompok separatis tersebut, meskipun Rusia membantahnya, mengatakan bahwa orang-orang Rusia yang bergabung dengan pemberontak adalah sukarelawan.

Pada September 2014, kedua pihak yang terlibat dalam konflik Ukraina dan separatis yang didukung Rusia menandatangani perjanjian damai Minsk I, namun kesepakatan ini tidak berhasil menghentikan pertempuran besar yang terus berlangsung. Ketegangan semakin meningkat, dan pada Februari 2015, upaya diplomatik lainnya muncul dengan perjanjian Minsk II yang dimediasi oleh negara-negara Prancis dan Jerman. Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, pertempuran kecil terus berlanjut, dan tidak ada solusi politik yang efektif.

Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat merespons tindakan Rusia dengan menjatuhkan sanksi ekonomi yang menyasar berbagai sektor ekonomi Rusia, seperti energi dan perbankan. Namun, hubungan antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat semakin memburuk, dan meskipun ada beberapa upaya untuk mencari solusi damai, situasi di Ukraina timur tetap penuh ketegangan. Pada tahun 2020 hingga saat ini, ketegangan kembali meningkat ketika Rusia kembali memperlihatkan tanda-tanda pengiriman pasukan ke perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya berdampak juga kepada NATO. Hal ini dapat terjadi dikarenakan konflik ini mengancam keamanan, geopolitik, stabilitas regional, dan prinsip-prinsip dasar organisasi tersebut.

Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari sphere of influence-nya dan tidak ingin negara tersebut bergerak lebih dekat dengan Uni Eropa atau NATO. Pada saat yang sama, NATO memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Eropa, terutama di negara-negara anggota yang terletak di kawasan Eropa Timur dan Baltik. Ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina dan menganeksasi Krimea pada 2014, NATO melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan kolektif di kawasan tersebut.⁴ Kemudian, beberapa negara NATO yang berada dekat dengan Rusia dan Ukraina merasakan kekhawatiran, negara-negara tersebut merasa terancam oleh kemungkinan perluasan konflik ke wilayah mereka. NATO, sebagai organisasi pertahanan yang berfokus pada stabilitas Eropa, Rusia merasa perluasan NATO ke timur sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Jika Rusia berhasil mendominasi Ukraina, banyak negara di Eropa Timur yang terancam dan ini dapat merusak stabilitas wilayah Eropa secara keseluruhan.⁵

Kemudian yang terakhir NATO merasa bahwa agresi yang terus dilakukan oleh Rusia akan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi Eropa. Salah satu dampak terbesar dari perang ini adalah gangguan signifikan terhadap pasokan energi ke Eropa. Sebelum perang, Eropa sangat bergantung pada Rusia untuk pasokan gas alam dan minyak. Sekitar 40% pasokan gas alam Eropa berasal dari Rusia, yang membuat banyak negara Eropa, terutama Jerman, sangat rentan terhadap gangguan ini.⁶ Perang ini juga menyebabkan lonjakan inflasi yang cukup signifikan di Eropa. Inflasi di Eropa meningkat tajam

⁴ NATO, "NATO and the Russian Aggression against Ukraine," **NATO Official Website**, diakses 7 April 2025, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_82785.htm.

⁵ Götz, Eva, *Russia and NATO: The Eastward Expansion Debate*, NATO Review, 2017, <https://www.nato.int/docu/review/2017/also-in-2017/russia-nato-eastward-expansion/EN/index.htm>.

⁶ European Commission. (2023). *EU energy policy: Ensuring affordable, secure and sustainable energy*. Diakses dari <https://ec.europa.eu/info/energy>.

terutama karena kenaikan harga energi dan bahan pangan. Ukraina dan Rusia adalah dua pemasok utama pangan dunia, khususnya gandum dan minyak nabati. Ketika perang mengguncang kedua negara ini, pasokan pangan global terhambat, menyebabkan lonjakan harga pangan. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang ini memperburuk sentimen pasar global. Investor cenderung menghindari risiko tinggi, dan ini berimbas pada penurunan investasi asing langsung (FDI) di Eropa.⁷ Negara-negara yang terlibat dalam konflik atau yang terpengaruh langsung oleh perang ini juga menghadapi penurunan kepercayaan dari investor internasional. Secara keseluruhan perang antara Rusia dan Ukraina ini sangat berdampak dalam banyak hal, atas hal tersebut NATO ataupun negara-negara lain yang ada di dunia ini sangat mengharapkan perdamaian antara dua belah pihak.

Peran Indonesia Sebagai Negara Non Blok Dalam Konflik Antara Rusia, Ukraina, dan NATO

Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatasi konflik antarnegara dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menuntaskan persoalan mereka berdasarkan aturan hukum yang berlaku di tingkat global. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa internasional antara Rusia dan Ukraina diantaranya: penyelesaian melalui International Criminal Court, arbitrase, mediasi, konsiliasi, maupun pencarian fakta. Di sisi lain, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara paksa atau menggunakan kekerasan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seperti: perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan pembalasan, blokade secara damai, dan intervensi.⁸

Dalam usaha penyelesaian konflik tersebut PBB wajib melakukan upaya perdamaian antara kedua negara dan organisasi internasional tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yakni semua negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional mereka secara damai, sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak membahayakan, PBB telah melakukan upaya melalui diplomasi serta dialognya, namun sengketa tersebut berakhir dengan penyelesaian dengan cara kekerasan yakni melalui perang bersenjata.

Indonesia sebagai negara yang berkekuatan geografis, identitas, dan perilakunya sebagai aktor internasional yang mendukung multilateralisme dan mediator perselisihan⁹ melalui berbagai kerjasama internasional yang dilakukan dengan negara-negara lain. Di sisi lain, secara politis dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan kedekatan Indonesia dengan salah satu aliansi kekuatan dunia, padahal Indonesia menganut prinsip luar negeri bebas aktif yang selama ini mengedepankan *dynamic equilibrium* dengan memperkuat hubungan regional.¹⁰ Dalam hal upaya memperlakukan konflik antara Rusia dan Ukraina Indonesia berusaha mencari jalan tengah dengan mengedepankan narasi yang lebih netral dan fokus pada upaya penyelesaian damai, alih-alih menyalahkan atau mengutuk salah satu pihak. Salah satu faktornya yakni karena Ukraina termasuk ke dalam sepuluh besar penghasil gandum di dunia terhadap Industri pangan Indonesia dan Rusia, presiden Joko Widodo meminta kedua belah pihak yang berkonflik untuk tetap memenuhi permintaan gandum nasional agar tidak terjadi lonjakan harga. Selain itu posisi Indonesia di antara konflik tersebut bertujuan untuk melindungi ekonomi nasional dari inflasi.

Dengan alasan dan status netral yang dimiliki tersebut Indonesia berperan menyampaikan dialog dan upaya diplomasi. Dapat kita lihat dari posisi Indonesia sebagai Presiden forum G20 Indonesia berpotensi menjadi figur jembatan kepentingan, pemersatu, penengah konflik, perangkul kepentingan global, sekaligus mengoptimalkan diplomasi multilateral. Salah satu contohnya yakni Indonesia menarik diri dalam pemungutan suara untuk resolusi yang menyerukan pengusiran Rusia dari Keanggotaan Tetap Dewan Keamanan PBB serta pembatalan undangan Rusia dari KTT G20. Meski menghadapi tekanan internasional, Indonesia—baik dalam KTT G20 maupun Pertemuan P20—

⁷ International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook Update*. Diakses dari <https://www.imf.org>.

⁸ Putra, K. A. A., Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Dantes, K. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 260–268. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/52032>

⁹ Kusumaningprang, R. M. (2017). The Roots and Evolution of Indonesia's Middle Power Activism. *The Indonesian Quarterly*, 45(2), 152 – 179.

¹⁰ Susanto, J. (2022). Indonesia di G20: Konteks, Pendekatan dan Tantangan Kontemporer. Hasil wawancara mendalam pada 20 April 2022.

mempertahankan keikutsertaan Rusia di G20 dan mengundang Ukraina sebagai tamu istimewa.¹¹ Indonesia senantiasa menjaga equidistance dengan semua kekuatan global tanpa terikat aliansi khusus, baik dengan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok. Secara konsisten, baik lembaga eksekutif maupun legislatif di Indonesia selalu membuka ruang dialog bilateral dan mendengarkan secara seimbang narasi dari Rusia dan Ukraina terkait eskalasi konflik, implikasi ekonomi, serta dampak kemanusiaan yang timbul. Dalam konteks persaingan Barat-Rusia, terlihat jelas bahwa Indonesia konsisten mengambil sikap menyeimbangkan dan berupaya membangun identitasnya sebagai kekuatan penyeimbang Asia yang tidak selalu sejalan dengan blok tertentu.¹² Hal tersebut dilakukan dengan alasan KTT G20 merupakan forum ekonomi bukan forum politik.

Menanggapi keadaan perang antara Rusia dan Ukraina Indonesia juga melakukan bantuan sosial dan kemanusiaan dengan melakukan penyumbangan 500 ribu UA Hryvna dalam bentuk obat-obatan kepada Kepala Klinik Rumah Sakit Militer Kementerian Pertahanan Ukraina oleh perusahaan farmasi Indonesia, “Sanbe Farma” dan “Novell Pharmaceutical Laboratories.” Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional melalui *Ukrainian Red Cross Society* (URCS) memberikan bantuan 11.000 paket Indonesian AID kepada wilayah Kyiv, Sumy dan Chernihiv.

SIMPULAN

Konflik Rusia-Ukraina yang berakar pada persaingan geopolitik antara blok Barat dan Rusia telah berkembang menjadi krisis multidimensi dengan implikasi global. Penelitian ini mengungkap bahwa konflik yang dipicu oleh penundaan perjanjian asosiasi Ukraina-Uni Eropa pada 2013 telah mengalami eskalasi melalui aneksasi Krimea (2014) hingga invasi skala penuh (2022), dengan upaya perdamaian melalui Perjanjian Minsk I dan II gagal menciptakan solusi berkelanjutan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan Eropa melalui reaksi NATO, tetapi juga menyebabkan disrupsi ekonomi global, khususnya dalam sektor energi dan ketahanan pangan, yang memicu inflasi di berbagai negara.

Sebagai negara non-blok, Indonesia telah memainkan peran strategis melalui pendekatan khas berdasarkan prinsip bebas-aktif. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20, Indonesia berhasil mempertahankan netralitas dengan: menolak resolusi pengusiran Rusia dari keanggotaan PBB sambil mengundang Ukraina sebagai tamu istimewa; memfasilitasi dialog multilateral tanpa berpihak; dan memberikan bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah konflik. Pendekatan equidistance ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perdamaian tetapi juga melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan gandum dan menghindari dampak inflasi. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya penguatan mekanisme hukum internasional dan reformasi struktur keamanan kolektif di bawah PBB untuk mencegah eskalasi serupa di masa depan. Bagi Indonesia, momentum ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisinya sebagai mediator kredibel di kawasan Asia, sekaligus mengembangkan kapasitas diplomasi preventif dalam menghadapi polarisasi global yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Ali, Menggali Teori Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hal. 47.
Ben Bland, “Indonesia shows the value of non-aligned leadership”, Chatham House, 28 November 2022, accessed on August 11, 2023, <https://www.chathamhouse.org/2022/11/indonesia-shows-value-non-aligned-leadership>.
European Commission. (2023). EU energy policy: Ensuring affordable, secure and sustainable energy. Diakses dari <https://ec.europa.eu/info/energy>.

¹¹ Wardhani, B., & Dharmaputra, R. (2024). Indonesia’s ambivalence in the Russia-Ukraine war: Balancing equal sovereignty norms with a familial approach. *Contemporary Security Policy*, 45(4), 627-642.

¹² Ben Bland, “Indonesia shows the value of non-aligned leadership”, Chatham House, 28 November 2022, accessed on August 11, 2023, <https://www.chathamhouse.org/2022/11/indonesia-shows-value-non-aligned-leadership>



- Götz, Eva, Russia and NATO: The Eastward Expansion Debate, NATO Review, 2017, <https://www.nato.int/docu/review/2017/also-in-2017/russia-nato-eastward-expansion/EN/index.htm>.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). World Economic Outlook Update. Diakses dari <https://www.imf.org>.
- Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hal. 98 dan hal. 111
- Kusumaningprang, R. M. (2017). The Roots and Evolution of Indonesia's Middle Power Activism. *The Indonesian Quarterly*, 45(2), 152 – 179.
- NATO, "NATO and the Russian Aggression against Ukraine," NATO Official Website, diakses 7 April 2025, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_82785.htm.
- Putra, K. A. A., Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Dantes, K. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 260–268. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52032>
- Susanto, J. (2022). Indonesia di G20: Konteks, Pendekatan dan Tantangan Kontemporer. Hasil wawancara mendalam pada 20 April 2022.
- Wardhani, B., & Dharmaputra, R. (2024). Indonesia's ambivalence in the Russia-Ukraine war: Balancing equal sovereignty norms with a familial approach. *Contemporary Security Policy*, 45(4), 627-642.